



**ANALISIS FUNGSI PERUBAHAN STATUS CAGAR ALAM MUTIS MENJADI TAMAN
NASIONAL DARI ASPEK PEMBANGUNAN SOSIAL**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Filsafat**

Oleh

REMIGIUS OPAT

NPM: 22.75.7400

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO

2026

LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

1. Nama : Remigius Opat
2. NPM : 22.75.7400
3. Judul Skripsi : Analisis Fungsi Perubahan Status Cagar Alam Mutis menjadi Taman Nasional dari Aspek Pembangunan Sosial

4. Pembimbing

1. Amandus Benediktus Seran Klau, S. Fil., M. I. K :

(Penanggung Jawab)

2. Dr. Bernardus Subang Hayong :

3. Dr. Puplius Meinrad Buru :

5. Tanggal Penerimaan : 27 April 2026

6. Mengesahkan:

Wakil Rektor I



Dr. Yosef Keladu

7. Mengetahui

Rektor IFTK Ledalero



Prof. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian

dari Syarat-syarat guna Memperoleh

Gelar Sarjana Filsafat

Program Studi Ilmu Filsafat

Pada

21 Mei 2026

Mengesahkan

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO

Rektor



Prof. Dr. Otto Gusti Ndëgong Madung

Dewan Penguji:

- | | |
|--|---|
| 1. Amandus Benediktus Seran Klau, S. Fil., M. I. K : |  |
| 2. Dr. Bernardus Subang Hayong : |  |
| 3. Dr. Puplius Meinrad Buru : |  |

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Remigiu Opat

NMP: 22.75.7400

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

**“ANALISIS FUNGSI PERUBAHAN STATUS CAGAR ALAM MUTIS
MENJADI TAMAN NASIONAL DARI ASPEK PEMBANGUNAN SOSIAL”** ini
benar-benar hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari diketahui adanya pelanggaran akademis, berupa plagiasi, atau penjiplakan dan sejenisnya di dalam skripsi saya ini, saya bersedia menerima sanksi akademis, yaitu pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui.

Ledalero, Maret 2026

Pembuat pernyataan

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of sharp, vertical strokes followed by a horizontal line and a small flourish.

Remigius Opat

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA: Remigius Opat

NPM : 22.75.7400

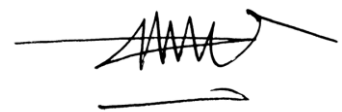
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Fre*) atas Skripsi saya yang berjudul: **ANALISIS FUNGSI PERUBAHAN STATUS CAGAR ALAM MUTIS MENJADI TAMAN NASIONAL DARI ASPEK PEMBANGUNAN SOSIAL** beserta perangkat yang diperlukan (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat: Ledalero

Pada tanggal : 23 Mei 2026

Yang menyatakan



Remigius Opat

KATA PENGANTAR

Pembangunan dalam pemahaman yang mendasar merupakan proses transformasi struktural dan kultural yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara utuh dan berkelanjutan. Proses ini tidak boleh direduksi semata-mata pada pertumbuhan ekonomi, karena dimensi kemanusiaan, sosial, budaya, dan ekologis justru menjadi fondasi utama dari kesejahteraan sejati. Dalam konteks Indonesia, pembangunan nasional sering kali dihadapkan pada tantangan besar: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan upaya pelestarian lingkungan yang semakin terdesak oleh eksploitasi sumber daya alam secara masif. Pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tanpa memperhatikan daya dukung ekosistem dan keadilan sosial, telah melahirkan berbagai krisis ekologis dan ketimpangan struktural yang merugikan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di kawasan-kawasan rawan lingkungan.

Paradigma pembangunan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan menuntut adanya integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam kerangka inilah konsep pembangunan sosial berbasis konservasi menjadi relevan untuk dikaji dan diimplementasikan. Pembangunan sosial berbasis konservasi tidak hanya menekankan pada perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis suatu kawasan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat lokal, pengakuan terhadap hak-hak tradisional, serta distribusi manfaat yang adil dari sumber daya alam. Pendekatan ini mengakui bahwa masyarakat lokal bukanlah penghambat konservasi, melainkan mitra utama yang memiliki pengetahuan, kearifan, dan kepentingan langsung dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup mereka.

Salah satu bentuk kebijakan konservasi yang memiliki implikasi sosial sangat luas adalah perubahan status kawasan konservasi, misalnya dari cagar alam menjadi taman nasional. Perubahan status ini bukanlah sekadar perubahan administratif atau nomenklatur, melainkan sebuah pergeseran fundamental dalam tata kelola sumber daya alam, sistem zonasi, akses masyarakat, dan pola relasi

antara negara, masyarakat, dan lingkungan. Di satu sisi, perubahan ini dapat membuka peluang bagi pemanfaatan kawasan secara lebih fleksibel, seperti pengembangan ekowisata, pemanfaatan hasil hutan non-kayu secara legal, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan. Di sisi lain, tanpa perencanaan yang partisipatif dan berkeadilan, perubahan status justru berisiko menimbulkan konflik sosial, marginalisasi masyarakat adat, serta erosi nilai-nilai budaya dan spiritual yang selama ini menjadi perekat hubungan harmonis antara manusia dan alam.

Kawasan Gunung Mutis yang terletak di Pulau Timor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan contoh nyata dari dinamika tersebut. Sejak ditetapkan sebagai cagar alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 89/Kpts-II/1983, kawasan ini telah diakui memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi, baik sebagai daerah tangkapan air (*catchment area*) yang menopang kehidupan ribuan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, hingga Belu, maupun sebagai habitat bagi flora dan fauna endemik seperti pohon ampupu (*Eucalyptus urophylla*), rusa timor, kuskus, kakatua kecil jambul kuning, dan berbagai jenis burung serta reptil. Namun, bagi masyarakat adat di sekitar Mutis, kawasan ini bukan sekadar ruang ekologis. Gunung Mutis dipandang sebagai pusat kehidupan, tempat bersemayamnya roh-roh leluhur, dan sumber identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Praktik-praktik adat seperti ritual penghormatan terhadap hutan, aturan larangan menebang pohon tertentu, serta pengelolaan mata air secara kolektif telah berlangsung lama dan secara efektif menjaga keseimbangan ekosistem jauh sebelum kawasan ini ditetapkan secara formal sebagai kawasan konservasi.

Namun, status cagar alam yang menerapkan rezim perlindungan ketat sering kali berbenturan dengan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat. Pembatasan akses terhadap kayu, rotan, madu hutan, lahan penggembalaan, serta ruang untuk melaksanakan ritual adat menimbulkan ketegangan sosial yang berkepanjangan. Masyarakat merasa diasingkan dari wilayah yang secara historis dan kultural merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Pada saat yang sama, pemerintah berkewajiban untuk menjaga kelestarian ekosistem yang memiliki fungsi strategis bagi wilayah yang lebih luas. Dilema antara perlindungan ekologis

dan pemenuhan hak-hak sosial ekonomi masyarakat lokal inilah yang mendorong pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk mengeluarkan kebijakan perubahan status. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 96 Tahun 2024 pada tanggal 8 Desember 2024, Cagar Alam Mutis resmi diubah menjadi Taman Nasional Mutis, yang kemudian digabungkan dengan kawasan hutan lindung Timau menjadi satu kesatuan pengelolaan dengan luas lebih dari 40.000 hektare.

Perubahan status ini membawa konsekuensi mendasar terhadap sistem pengelolaan kawasan. Taman nasional, berbeda dengan cagar alam, menerapkan sistem zonasi yang membagi wilayah menjadi zona inti (perlindungan ketat), zona pemanfaatan (untuk ekowisata dan rekreasi), zona tradisional (untuk aktivitas budaya dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu secara terbatas), serta zona rimba. Sistem ini secara teoritis memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat lokal, sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis konservasi. Namun, dalam praktiknya, keberhasilan model ini sangat bergantung pada sejauh mana proses perubahan status dilakukan secara partisipatif, transparan, dan menghormati hak-hak masyarakat adat. Sayangnya, berbagai laporan dari lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi dan konsultasi publik masih terbatas, bahkan di beberapa desa masyarakat melakukan ritual penutupan adat sebagai bentuk protes terhadap prosedur yang dianggap sepihak. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi akar utama dari potensi konflik yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan taman nasional itu sendiri.

Berangkat dari realitas kompleks tersebut, penulis merasa terdorong untuk melakukan kajian mendalam mengenai fungsi sosial dari perubahan status Cagar Alam Mutis menjadi Taman Nasional serta dampaknya terhadap pembangunan sosial masyarakat lokal. Penelitian ini tidak hanya membatasi diri pada analisis kebijakan dan ekologi, tetapi juga memperkaya perspektif dengan refleksi teologis dan etis yang menempatkan manusia sebagai penatalayan ciptaan. Dalam terang iman Kristen, alam dipahami bukan sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai ciptaan Allah yang memiliki nilai intrinsik dan sakral. Manusia dipanggil untuk mengelola alam dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan solidaritas, terutama terhadap mereka yang paling rentan terdampak oleh kerusakan lingkungan. Dengan

demikian, pembangunan sosial berbasis konservasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan atau perlindungan ekologis, tetapi juga pada pemulihan relasi harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tulisan ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab akademik, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada: *Pertama*, Tuhan Yang Mahakuasa, atas anugerah kesehatan, ketekunan, dan kelancaran proses penulisan sehingga tulisan ini dapat diselesaikan tepat waktu. *Kedua*, Pater Amandus Benediktus Seran Klau, S.Fil., M.I.K., selaku dosen pembimbing, yang dengan kesabaran dan tanggung jawab akademik telah membimbing penulis secara substantif sejak perencanaan hingga penyelesaian tulisan ini. *Ketiga*, Dr. Bernardus Subang Hayong selaku dosen penguji, yang telah memberikan kritik, saran, dan pengayaan substansial terhadap isi tulisan ini.

Keempat, seluruh civitas akademika Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, tempat penulis menempuh pendidikan di bidang filsafat, atas seluruh fasilitas dan bimbingan intelektual yang diberikan. *Kelima*, Serikat Sabda Allah (SVD), khususnya Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero, yang telah membentuk karakter disiplin dan kesetiaan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab akademik. *Keenam*, P. Yanto Nabon, SVD yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk berdiskusi serta memberikan arahan dalam menentukan judul tulisan ini. *Ketujuh*, rekan-rekan mahasiswa Angkatan 85 Ledalero, atas motivasi dan diskusi kolegal yang turut mendorong penyelesaian tulisan ini. *Kedelapan*, kelompok diskusi “Squad Absurd tetapi Solid” (Dedi Suni, Alan Ruing, Joe Raga, Rio Sasi, Ito Pineul, Stefen Mau, dan Ferdin Dede), atas ruang dan waktu yang disediakan untuk bertukar pikiran secara kritis.

Kesembilan, Bernad Badj dan Ito Benggu, atas kesediaan mereka berdiskusi, mengoreksi, dan memberikan dukungan moral serta intelektual dalam proses penyelesaian tulisan ini. *Kesepuluh*, Rosalinda Roslin, yang turut mendukung dan memberikan ruang dan waktu untuk berdiskusi sekaligus memberikan sokongan material dalam menyelesaikan tulisan ini. *Kesebelas*,

keluarga penulis: Bapak Mikhael Opat, Mama Vinsensia Bessi, Kakak Maria Goreti Opat, Kakak Alegunda Opat, Kakak Fortunatus Opat, Kakak Bruder Kristoforus Opat, SVD, dan Kakak Yohanes Opat, atas dukungan moral, spiritual, dan material selama masa studi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum mencapai taraf kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis secara terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam aspek pembangunan sosial

ABSTRAKSI

Remigius Opat, 22.75.7400. **Analisis Fungsi Perubahan Status Cagar Alam Mutis menjadi Taman Nasional dari Aspek Pembangunan Sosial.** Skripsi. Program Sarjana, Program Studi Ilmu Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2026.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis fungsi sosial dari perubahan status Cagar Alam Mutis menjadi Taman Nasional, (2) mengkaji dampak perubahan status tersebut terhadap pembangunan sosial masyarakat lokal, dan (3) merumuskan implikasi teologis-etis dari perubahan status kawasan konservasi sebagai landasan bagi terwujudnya keadilan sosial dan ekologis, serta memberikan rekomendasi pengelolaan berbasis partisipasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang menelaah jurnal ilmiah, buku, internet dan hasil penelitian terdahulu, serta dilengkapi refleksi teologis dan etis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status memiliki dua fungsi sosial utama. *Pertama*, mengubah pola pengelolaan kawasan dari rezim perlindungan ketat menuju sistem zonasi yang lebih fleksibel, sehingga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya secara terbatas dan berkelanjutan, seperti ekowisata dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu. *Kedua*, perubahan status berfungsi sebagai instrumen legal yang memungkinkan integrasi antara konservasi ekologis dan pembangunan ekonomi lokal. Namun demikian, perubahan ini juga berdampak ganda terhadap pembangunan sosial. Di satu sisi, terbuka peluang peningkatan kesejahteraan melalui ekonomi berbasis konservasi. Di sisi lain, muncul ketimpangan akses, erosi nilai budaya dan spiritual masyarakat adat, dan ketegangan sosial akibat minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perubahan status.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan sosial berbasis konservasi di Taman Nasional Mutis memerlukan pendekatan kolaboratif antara negara, masyarakat adat, dan Gereja, serta pengakuan terhadap kearifan lokal. Secara teologis-etis, pengelolaan kawasan harus didasarkan pada keadilan ekologis dan solidaritas sosial. Integrasi antara konservasi, pembangunan sosial, dan nilai spiritual menjadi kunci terciptanya pengelolaan kawasan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Cagar Alam, Mutis, Taman Nasional, dan Pembangunan Sosial.

ABSTRACTION

Remigius Opat, 22.75.7400. **Analysis of the Social Function of Changing the Status of Mutis Nature Reserve to a National Park from the Aspect of Social Development.** Bachelor Program Study, Philosophy Study Program, Ledalero Institute of Philosophy and Creative Technology, 2026.

This study aims to (1) analyze the social function of changing the status of the Mutis Nature Reserve to a National Park, (2) examine the impact of this status change on the social development of local communities, and (3) to formulate the theological-ethical implications of changes in the status of a conservation for achieving social and ecological justice, as well as to provide recommendations for participatory-based management. The method used is descriptive qualitative with a library research approach, examining official documents, scientific journals, books, and previous research findings, complemented by theological and ethical reflections.

The findings indicate that the status change serves two main social functions. First, it transforms the management regime from a strict protection system to a more flexible zoning system, thereby opening space for community participation in the limited and sustainable utilization of natural resources, such as ecotourism and the use of non-timber forest products. Second, the status change functions as a legal instrument that enables the integration of ecological conservation and local economic development. However, this change also has a twofold impact on social development. On the one hand, it creates opportunities for improved welfare through conservation-based economic activities. On the other hand, it gives rise to access inequalities, erosion of the cultural and spiritual values of indigenous communities, and social tensions due to minimal community involvement in the status change process.

This study concludes that the success of conservation-based social development in the Mutis National Park requires a collaborative approach involving the state, local communities, and the church, as well as recognition of local wisdom. From a theological-ethical perspective, the management of the area must be grounded in ecological justice and social solidarity. The integration of conservation, social development, and spiritual values is the key to creating a sustainable and just management of the area.

Keywords: Mutis, Nature Reserve, National Park, and Social Development.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENERIMAAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAKSI.....	x
ABSTRACTION.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penulisan.....	6
1.4. Metode Penulisan.....	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KONTEKS PERUBAHAN STATUS CAGAR ALAM MUTIS.....	9
2.1. Profil Geografis dan Ekologis Kawasan	9
2.1.1. Letak Geografis.....	10
2.1.2. Karakteristik Ekologis Kawasan Cagar Alam Mutis.....	11
2.1.2.1. Tipe Vegetasi dan Keanekaragaman Flora.....	12
2.1.2.2. Keanekaragaman Fauna.....	13
2.2. Sejarah Penetapan Sebagai Cagar Alam.....	15
2.2.1. Dasar Hukum	15
2.2.2. Tujuan Awal Konservasi Kawasan Mutis.....	17
2.3. Proses Perubahan Status menjadi Taman Nasional	18
2.3.1. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah	19
2.3.2. Aktor-aktor yang Terlibat dalam Proses Perubahan Status	21
2.4. Perubahan Fungsi dan Tata Kelola Kawasan	22

2.4.1. Cagar Alam	24
2.4.2. Taman Nasional.....	26
2.4.3. Implikasi terhadap pengelolaan Sumber Daya dalam Kawasan Mutis....	28
2.5. Posisi Masyarakat Lokal dalam Dinamika Status Kawasan.....	29
2.5.1. Hak Akses terhadap Sumber Daya.....	30
2.5.2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan	31
2.5.3. Relasi Sosial Masyarakat terhadap Kawasan Konservasi.....	33
BAB III PEMBANGUNAN SOSIAL BERBASIS KONSERVASI	35
3.1. Konsep Pembangunan Sosial dalam Perspektif Teoretis.....	35
3.1.1. Defenisi Pembangunan Sosial.....	35
3.1.2. Indikator Pembangunan Sosial.....	37
3.1.3. Pendekatan Pembangunan Berbasis Komunitas dan Lingkungan	41
3.2. Fungsi Kawasan Konservasi dalam Pemberdayaan Sosial.....	43
3.2.1. Pendidikan Lingkungan	44
3.2.2. Penguatan Ekonomi Lokal	46
3.2.3. Pelestarian Identitas Budaya	48
3.3. Dampak Sosial dari Perubahan Status Kawasan	50
3.3.1. Hak Akses terhadap Sumber Daya	50
3.3.2. Perubahan Pola Ekonomi dan Mata Pencaharian.....	52
3.3.3. Transformasi Nilai Budaya dan Spiritual Masyarakat	55
3.4. Studi Literatur tentang Konservasi dan Pembangunan Sosial	57
3.4.1. Konservasi dan Pembangunan Sosial di Indonesia.....	57
3.4.2. Konservasi Mutis sebagai Nilai Ekologis dan Sosial Budaya	59
3.4.3. Perbandingan dengan Kasus Internasional.....	60
3.4.4. Analisis dan Sintesis	61
3.5. Analisis Kritis terhadap Kebijakan Konservasi di Mutis.....	62
3.5.1. Evaluasi Pendekatan Teknokratis	63
3.5.2. Evaluasi Pendekatan Partisipatif	64
3.5.3. Ketegangan antara Pelestarian dan Pembangunan.....	66

3.5.4. Refleksi Kritis	67
BAB IV REFLEKSI DAN IMPLIKASI	69
4.1. Refleksi Teologis dan Etis terhadap Perubahan Status Kawasan	69
4.1.1. Pandangan Teosentris dalam Pengelolaan Ciptaan.....	70
4.1.2. Keadilan Ekologis	72
4.1.3. Solidaritas Sosial dalam Pengelolaan Ciptaan	74
4.2. Implikasi terhadap Keadilan Sosial dan Ekologis.....	77
4.2.1. Ketimpangan Akses dan Distribusi Manfaat.....	78
4.2.2. Potensi Konflik dan Resolusi Berbasis Nilai	79
4.3. Rekomendasi untuk Pengelolaan Berbasis Partisipasi.....	81
4.3.1. Model Kolaboratif antara Negara, Masyarakat, dan Gereja	82
4.3.2. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lokal.....	84
4.4. Potensi Model Pembangunan Sosial Berkelanjutan di Mutis	87
4.4.1. Integrasi Konservasi dan Kesejahteraan sosial	87
4.4.2. Spiritual sebagai Fondasi Etis Pembangunan	89
4.4.3. Gunung Mutis sebagai Model Alternatif Pembangunan.....	91
BAB V PENUTUP	94
5.1. Kesimpulan	94
5.2. Saran.....	97
5.2.1. Bagi Gereja.....	97
5.2.2. Bagi Pemerintah.....	97
5.2.3. Bagi Masyarakat Lokal.....	98
5.2.4. Bagi IFTK Ledalero.....	98
5.2.5. Bagi Peneliti Selanjutnya.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101